

ANTARA NEWS BALI

Mencerahkan, Memberdayakan, Mendukung, Nasionalisme



**PEMKOT DENPASAR DAN BANDUNG
UPAYA TINGKATKAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAHAN**

Hal.6



**PEMKAB BADUNG RAIH
"JKN-KIS AWARD 2018"**

Hal.8

3

GWK

JADI KEBANGGAAN BANGSA

Gubernur Bali Harapkan Masyarakat Beri Masukan Pilkada

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan masyarakat setempat dapat menyampaikan masukan terkait pesta demokrasi Pilkada 2018 dalam acara “simakrama” atau temu wicara yang digelar 26 Mei mendatang.

“Lewat kegiatan simakrama ini, Bapak Gubernur mengharapkan masyarakat dapat memberikan sumbangsih bagi proses pembangunan berdemokrasi di Pulau Dewata,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra, di Denpasar, Jumat.

Selain itu, lanjut Dewa Mahendra, sejumlah narasumber juga akan dihadirkan untuk memberi pandangan tentang Pilkada Bali 2018.

Kegiatan simakrama pada Sabtu (26/5) akan digelar di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, dengan mengusung tema “Mencari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018-2023”.

“Pemilihan tema berkaitan dengan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang saat ini tengah bergulir,” ucapnya.

Oleh karena itu, masyarakat diundang untuk hadir pada kegiatan simakrama yang akan berlangsung sekitar tiga jam tersebut.

Sama seperti pelaksanaan simakrama sebelumnya, masyarakat yang ingin berpartisipasi diharapkan hadir pukul 08.00 Wita untuk proses registrasi.

“Sebagaimana pelaksanaan simakrama sebelumnya, acara akan dimulai pu-



Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra. (Humas Pemprov Bali)

kul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita. Simakrama akan diakhiri dengan Puja Trisandya dan makan siang bersama,” kata mantan Penjabat Bupati Bangli itu.

Sementara bagi masyarakat yang tidak berkesem-

patan hadir dalam kegiatan tersebut, dapat menyimak pelaksanaan simakrama melalui saluran Pro 1 RRI Denpasar 88,6 MHz atau menyaksikan langsung melalui live streaming di www.birohumas.baliprov.go.id.

Gubernur Pastika Minta Pemasaran Toko Tani Lewat Daring



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat meresmikan peluncuran Toko Tani Indonesia Center di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar. (Humas Pemprov Bali)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mendorong organisasi perangkat daerah segera menyiapkan sistem dalam jaringan (daring) untuk pemasaran berbagai produk yang disediakan Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

“Segera buat program online-nya, nanti tinggal di-

klik saja, dan bisa dianterin ke rumah pakai Go-JEK. Buat aplikasi,” kata Pastika usai meresmikan peluncuran Toko Tani Indonesia Center di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali di Denpasar, Jumat.

Menurut Pastika, dengan adanya TTIC tersebut dapat memotong rantai biaya distri-

busi berbagai komoditas bahan pangan, seperti beras. Kalau di pasaran rata-rata harga satu kilogram beras Rp11 ribu, di TTIC dijual seharga Rp8.800.

“Kehadiran TTIC adalah satu upaya untuk memotong rantai pasokan pangan panjang yang bertujuan menjaga stabilnya harga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat, sekaligus diversifikasi komoditas pokok dan komoditas lainnya dengan harga di bawah harga pasar,” ujarnya.

Pastika berharap Pemerintah Provinsi Bali bisa lebih banyak menyediakan beras yang dipasarkan TTIC sehingga inflasi dan kemiskinan di Bali bisa ditekan.

Bahkan menurutnya Perusda bisa melaksanakan hal

ini dengan bantuan permodalan dari Bank Pembangunan Daerah Bali.

“Dari segi permodalan tidak susah, kita punya bank, banknya untung, Perusda untung, petani untung, konsumen juga untung,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut dia, keuntungan yang didapat pemerintah bisa kembali digunakan untuk membantu petani dalam hal subsidi pupuk hingga memberikan bimbingan kepada petani mengenai teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyambut baik ide dari Gubernur Bali. Bahkan menurutnya beras ini nantinya bisa dijual secara e-commerce dengan bantuan distribusi dari Toko Tani Indonesia. (Ant)

Pastika: Arjuna Digital Perkuat Pemahaman Hindu



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi Arjuna Digital. (Humas Pemprov Bali)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan perlombaan “Arjuna Digital” yang diselenggarakan oleh “Paiketan Krama Bali” dapat memperkuat pemahaman generasi muda tentang agama Hindu.

“Penyelenggaraan pendidikan Hindu serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Hindu akan sangat menentukan eksistensi agama Hindu ke depan,” kata Pastika dalam acara pertemuan dengan guru agama Hindu SMA/SMK se-

Bali, di Denpasar, Selasa.

Menurut Pastika, pada era globalisasi saat ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai radikalisme mulai menyebar luas, bahkan mendegradasi nilai-nilai luhur keagamaan. Hal ini berpotensi sangat menyedihkan, tidak hanya bagi umat Hindu tetapi juga umat manusia di seluruh dunia.

“Di sini peran guru agama Hindu sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia Hindu terutama generasi muda Hindu,” ujarnya pada acara serangkaian Sosialisasi Lomba Arjuna Era Digital itu.

Dengan demikian, Pastika berharap kegiatan tersebut dapat dirancang dan dilaksanakan program-program nyata pemberdayaan umat

Hindu, termasuk bagi guru-guru agama Hindu sebagai kaum intelektual, pemegang peran penting bagi peningkatan kualitas generasi muda Hindu.

Dalam menghadapi zaman global, kata dia, umat Hindu harus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mewujudkan kesejahteraan hidup berlandaskan ajaran agama dan ilmu kebijaksanaan.

“Ajaran agama Hindu dan ilmu harus mampu membuat umat untuk ‘hidup’. Berbagai bekal hidup juga harus tersedia dan dimiliki umat Hindu. Untuk itu penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pembinaan karakter dan budi pekerti berdasar nilai-nilai Hinduisme, harus mulai dikembangkan,” ucapnya. (Ant)

Pastika : Patung GWK Jadi Kebanggaan Bangsa

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan patung Garuda Wisnu Kencana yang tingginya mencapai 121 meter dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

“Ini merupakan momen sejarah yang penting, akhirnya patung GWK mendekati proses penyelesaian,” kata Pastika ketika menghadiri ritual “pasupati” di pelataran Patung GWK, sekaligus pemasangan mahkota Dewa Wisnu pada Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Jimbaran, Badung, Minggu (20/5).

Mantan Kepala Polda Bali itu mengatakan dengan komitmen yang kuat dan teguh, patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) dapat diwujudkan dengan perjuangan panjang, baik material, spiritual, moral serta berbagai tantangan.

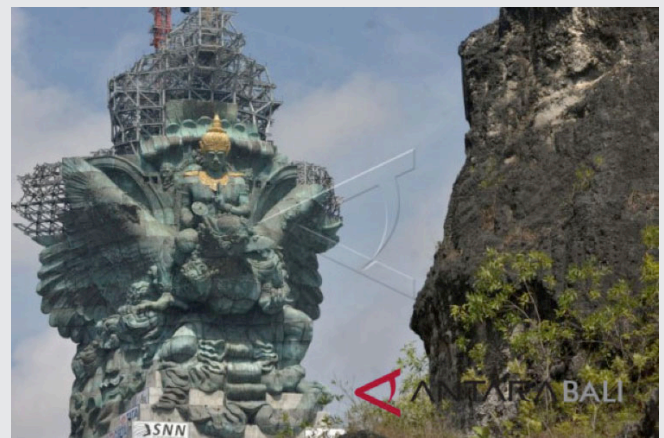
Pengerjaan patung ha-

sil mahakarya seniman Bali Nyoman Nuarta tersebut melibatkan banyak seniman lainnya yang tidak hanya dari Bali tapi juga dari daerah lainnya di Indonesia sehingga patung ini akan menjadi mahakarya luar biasa dari anak bangsa.

“Cita-cita kita bersama akhirnya bisa tercapai, ini merupakan karya luar biasa. Ini akan jadi kebanggaan rakyat Bali, kebanggaan Bangsa Indonesia, semoga tahapan ke depannya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama,” ujar Pastika.

Sementara itu, pemrakarsa patung GWK Nyoman Nuarta juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan semua pihak sehingga mahakarya ini mendekati tahap penyelesaian.

Sebagai pematung yang karya-karyanya tersebar di berbagai negara, dia merasa



Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) terlihat seusai proses pemasangan bagian Mahkota Dewa Wisnu di Ungasan, Badung, Bali, Minggu (20/5). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/2018

berkewajiban melahirkan karya besar untuk tanah kelahirannya. Didukung dengan pemandangan alam yang indah di sekelilingnya, patung GWK ini akan menambah destinasi pariwisata di Bali.

GWK bermula dari gagasan Nyoman Nuarta bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Joob Ave

dan peletakan batu pertamanya dilaksanakan di kawasan taman kebudayaan di Bukit Ungasan Jimbaran pada tahun 1997.

Hingga Mei 2018, pembangunan GWK telah mencapai 70 persen dan berdasarkan pemasangan modul-modul GWK ditargetkan selesai pada Agustus 2018. (Ant)

Gubernur Pastika Minta Pejabat Cepat Respons Perubahan



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membuka Diklatpim Tingkat II Angkatan XII Tahun 2018, di Denpasar. (Humas Pemprov Bali)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta para pejabat di lingkungan pemprov setempat dapat cepat dalam merespons perubahan yang terjadi agar jangan sampai tergilas dengan perubahan.

“Kita harus bisa merespons cepat perubahan itu. Kita juga harus tahu apa itu perubahan,

apa saja yang berubah, ke-mana berubahnya, bagaimana kok bisa terjadi perubahan, untuk apa itu perubahan dan bagaimana posisi kita dalam perubahan ini,” katanya saat membuka Diklatpim Tingkat II Angkatan XII Tahun 2018, di Denpasar, Rabu.

Oleh karena itu, dia ber-

harap Diklatpim tersebut akan mendorong pemahaman para top manager untuk mampu melakukan kajian kritis dan komprehensif terhadap masalah pembangunan melalui metode dan teknik analisis yang tepat dan efektif sehingga dapat memberikan solusi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bagi kepala daerah.

“Seorang pemimpin harus responsif sekaligus mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan tersebut. Pemimpin bukan manusia biasa. Seorang pemimpin harus memiliki berbagai kelebihan daripada yang dipimpinya,” ucapnya.

Menurut Pastika, pemimpin harus lebih pintar, lebih berani, lebih berwibawa, lebih kaya dan berbagai kelebihan lainnya. “Untuk itulah saudara-saudara dan seluruh PNS ha-

rus terus belajar dan belajar,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, dinamika global bergerak cepat yang bercirikan 3S (speed, surprise, suddenshift). Nilai-nilai global bersifat sangat kompleks dan organisasi birokrasi harus responsif, karena hanya mereka yang responsif yang bisa bertahan.

Dia mengharapkan kepada seluruh peserta diklat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya demi peningkatan kapabilitas dan kompetensi khususnya dalam menjalankan tugas jabatan struktural eselon II.

Pastika mengingatkan bahwa para peserta diklat adalah pejabat dan calon pejabat tingkat strategis yang di samping sebagai pemimpin adalah juga sebagai manajer. (Ant)

Bali Bentuk “KAD” Untuk Mantapkan Pemberantasan Korupsi

Provinsi Bali membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi di provinsi setempat untuk semakin memantapkan implementasi program pemberantasan korupsi.

“Terbentuknya KAD Antikorupsi di Provinsi Bali sebagai wadah komunikasi regulator dan para perwakilan entitas usaha ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik serta mendukung upaya pencegahan korupsi,” kata Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membuka rapat koordinasi Pembentukan KAD Antikorupsi Provinsi Bali, di Denpasar, Rabu.

Terkait potensi korupsi, ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah harus menjadi perhatian serius kita semua, baik permasalahan yang saat ini ada maupun potensi perkembangannya harus dirumuskan saran dan solusi yang tepat untuk terwujudnya

birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Dalam kerangka reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Bali telah mengupayakan langkah, seperti membuat Rencana Aksi Daerah Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, menindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal serta secara konsisten menerapkan tiga pilar “good governance” (transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik).

Sementara itu, Pimpinan KPK RI yang diwakili oleh Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko menyampaikan bahwa korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan instansi pemerintah, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak dalam bisnis/swasta.

“Sekitar 80 persen kasus korupsi yang diungkap KPK melibatkan sektor swasta dan



Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat membuka rapat koordinasi Pembentukan KAD Antikorupsi Provinsi Bali, di Denpasar. (Humas Pemprov Bali)

sektor publik atau instansi pemerintah dengan modus suap menyuap dan gratifikasi yang mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara atau pegawai negeri,” katanya.

Untuk itu, KAD Anti Korupsi ini dibentuk sebagai wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis), membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi sehingga pencegahan korupsi dapat

dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif.

Pembentukan KAD Anti Korupsi Provinsi Bali yang dibuka resmi oleh Gubernur Pastika turut dihadiri oleh Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Ketua Kadin serta pimpinan lembaga/asosiasi profesional provinsi dan kabupaten/ kota se-Bali. (Ant)

Pemkot Denpasar Tanda Tangan Pakta Integritas



Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung serta Pengadilan Negeri Denpasar saat menandatangani pakta integritas menuju "zona bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di Ruang Sidang Utama Cakra di Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar. (Humas Pemkot Denpasar)

Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung serta Pengadilan Negeri Denpasar menandatangani pakta integritas menuju "zona bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta prima melayani".

Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri Den-

pasar Sila Halolongan Pulungan di Denpasar, Rabu.

Kedua kepala daerah menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Negeri Denpasar atas inisiasi bersama-sama memproklamasikan zona menuju bebas KKN serta prima melayani.

Kepala Pengadilan Negeri Denpasar H. Amin Ismanto mengatakan bahwa penandatanganan pakta integritas kali ini bersama dua daerah, yakni Pemkot Denpasar dan

Pemkab Badung. Ke depannya, dapat tersosialisasi kepada publik tentang bebas KKN dan menuju pada pelayanan prima.

Selain itu, kata dia, langkah tersebut juga dapat mendukung dan meningkatkan pemahaman bersama terkait dengan komitmen bersama dari pemerintah pusat hingga daerah menuju bebas KKN dan melayani secara prima.

Sementara itu, Plt. Wali Kota Denpasar Jaya Negara setelah melakukan penandatanganan pakta integritas mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Namun, hal ini perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan, salah satunya adalah penandatanganan pakta integritas.

Upaya untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari KKN dan wilayah birokrasi bersih dan melayani seperti saat ini, kata dia, merupakan langkah strat-

egis dan penting bagi warga.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang menargetkan tercapainya tiga sasaran, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Menurut Jaya Negara, terwujudnya ketiga sasaran tersebut adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Hal tersebut juga mengakselerasikan pencapaian sasaran hasil itu, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Ant)

Pemkot Denpasar Lakukan Percepatan Pendaftaran Tanah

Pemerintah Kota Denpasar, Bali, melakukan percepatan pendaftaran tanah sesuai Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 dan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017.

Pelaksana tugas Wali Kota Denpasar, I Gusti Jaya Negara di Denpasar, Selasa, mengatakan demi suksesnya program tersebut diharapkan semua komponen masyarakat untuk berperan aktif. Hal tersebut guna mendukung pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan mengatur, menetapkan dan menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan

pendaftaran tanah sistematis lengkap di desa maupun kelurahan berdasarkan kemampuan peraturan daerah.

Ia mengatakan tahun 2018 Provinsi Bali memperoleh Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 270.000 bidang tanah, sedangkan Kota Denpasar ditargetkan sebanyak 10.000 bidang tanah.

Dengan demikian yang menjadi objek PTSL adalah semua bidang tanah termasuk Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayan Desa (AYDS) yang sebelumnya tidak jelas subyek haknya.

Jaya Negara mengatakan di Kota Denpasar masih ter-



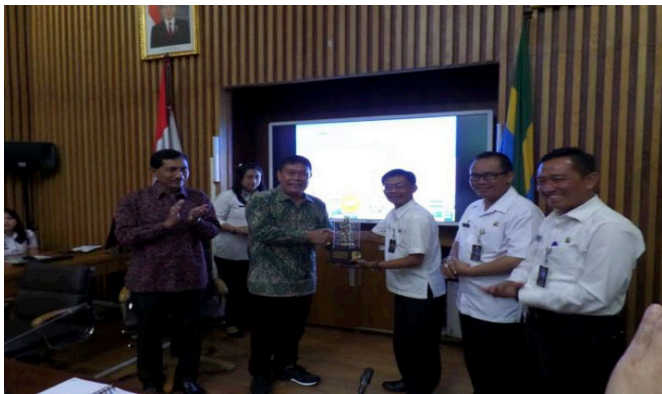
Plt. Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara buka Rakor Sosialisasi Menuju Denpasar Lengkap dan ajak Seluruh komponen Percepat Pendaftaran Tanah Sistematis (Foto Humas Pemkot Denpasar)

dapatnya 31.480 bidang tanah yang belum terpetakan.

"Saya meminta kepada seluruh jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) sampai tingkat lingkungan maupun kepala du-

sun agar membantu secara maksimal program PTSL tersebut, demi kepentingan masyarakat dan terwujudnya sensus pertanahan menuju Kota Denpasar Lengkap," ucapnya. (Ant)

Pemkot Denpasar dan Bandung Upaya Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan



Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan jajaran dalam kunjungannya ke Pemerintah Kota Bandung yang diterima oleh staf ahli bidang pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pemkot Bandung (Foto HUmas Pemkot Denpasar)

Kinerja pemerintah di era digital ini sejatinya terus mendapat pengawasan masyarakat. Budaya dan karakter masyarakat menjadi acuan dalam menerapkan program yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara dan jajaran dalam kunjungannya ke Pemerintah Kota Bandung yang diterima oleh staf ahli bidang pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pemkot Bandung, Dadang Gantina beserta jajarannya di Kan-

tor Walikota Bandung, Selasa (22/5).

Dalam kunjungan tersebut berbagai informasi terkait dengan mekanisme pengelolaan pemerintahan diadopsi dengan baik agar nantinya dapat diterapkan di Kota Denpasar sesuai dengan budaya masyarakatnya. Sehingga Upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilaksanakan di Kota Denpasar.

Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengatakan, Idealnya program dan kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat merupakan asas umum dalam penyelenggaraan Negara.

Pemerintah Kota Bandung dan Kota Denpasar secara umum telah memanfaatkan perkembangan IT dan berbagai inovasi berbasis IT untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan, kunjungan ini sangatlah bermanfaat karena dapat saling bertukar informasi agar dapat bersinergi dalam menerapkan akuntabilitas kerja pemerintahan di masing-masing daerah.

“Inovasi yang dilakukan menjadikan program-program dapat berjalan secara lebih efisien yang tentunya berimbas juga pada peningkatan performance masing-masing OPD dilingkungan pemerintahan dalam perkembangan penyelenggaraan,” ungkapnya. (Ant)

PKB ke-40 Kota Denpasar Resmi Dibuka Ditandai Dengan Tarian Geni Natyam

Gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40 memang masih sebulan lagi, sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya, seluruh kabupaten/kota di Bali turut menggelar ajang seni tahunan ini di wilayah masing-masing.

Pemkot Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang turut menggelar PKB ke-40 tahun 2018 ini dengan mengangkat tema senada dengan PKB ke-40 Provinsi Bali yakni ‘Teja Dharmaning Kahuripan’ yang mengandung makna api sebagai sepirit penciptaan. Kegiatan tahunan yang mengambil tempat di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Jumat (18/5) malam yang ditandai pementasan Tarian Geni Natyam yang dilanjutkan Penyulutan Api Obor oleh Plt. Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, Forkompinda Kota Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar, serta Tim Pembina Kesenian Kota Denpasar.

Diwawancarai disela pembukaan, Plt. Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan bahwa Denpasar merupakan kota kreatif yang berwawasan budaya.

Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya mengatakan bahwa Pemkot Denpasar secara berkesinambungan memberikan dukungan terhadap perkembangan dan kelestarian kesenian di Kota Denpasar.

Salah satunya adalah dari pelaksanaan PKB ke-40 di Kota Denpasar ini yang ten-



Pemkot Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar menggelar PKB ke-40 tahun 2018 dengan ‘Teja Dharmaning Kahuripan’ (Foto Humas Pemkot Denpasar)

tunya dapat menjadi momentum dalam penguatan seni dan budaya di Kota Denpasar. “Pelaksanaan PKB ke-40 di Kota Denpasar ini dapat menjadi momentum dalam menguatkan seni dan budaya sebagai ajang pelestarian seni budaya di Kota Denpasar,” paparnya.

Sementara, Kadis Kebudayaan Kota Denpasar selaku Ketua Panitia, IGN Bagus Mataram dalam lapo-

ranya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan PKB di Kota Denpasar secara umum adalah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seniman Kota Denpasar untuk berekspresi.

Dari gelaran PKB di Kota Denpasar setiap tahunnya terus tercipta sebuah garapan seni baru. Hal ini menunjukkan bahwa seniman dan seni di Kota Denpasar terus berkembang. (Ant)

Pemkab-Kejari Badung Tingkatkan Kerja Sama Bidang Hukum



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Kepala Kejari Badung Sunarko disaksikan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menandatangani MoU, di ruang Nayaka Gosana, Puspem Badung, Senin (21/5). (Foto Humas Pemkab. Badung)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Badung menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami memberikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Kejari Badung,” ujar Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, di Pusat Pemerintahan Badung, Senin.

Bupati Giri Prasta men-

gatakan, kesempurnaan sebuah tatanan pemerintahan, sangat besar diperankan oleh Kejaksaan, karena Kejaksaan dapat memberikan pendapat hukum dan pendampingan hukum, apalagi ketika dibutuhkan terkait “legal opinion”.

“Kami harus dan wajib meminta kepada Kepala Kejaksaan dan Pejabat Kejari Badung untuk membina kami dalam melaksanakan program kegiatan APBD Badung terhadap masyarakat. Karena kami ingin benar dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan dari sisi pengawasan,” ujar Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, pihaknya berharap setelah mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari Kejari, perangkat daerah di Badung khususnya pengguna anggaran, pejabat pelaksana kegiatan termasuk pejabat

pemeriksa hasil kegiatan akan merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya.

“Semoga, Pemkab Badung kedepannya mampu menjadikan masyarakatnya bahagia, dan saya harap sinergisitas ini tetap terjalin, khususnya berkenaan program KIK (Komunikasi, Informasi dan Koordinasi) Pemkab Badung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Badung Sunarko mengatakan, melalui penandatanganan MoU tersebut, Kejaksaan akan selalu `intens` melakukan koordinasi dengan Pemkab Badung.

“Kami yakin kedepannya dengan koordinasi yang baik dengan Pemkab Badung akan semakin menekan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada,” katanya. (Adv)

TPID Badung Gelar HLM Antisipasi Kenaikan Harga

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Bali menggelar “high level meeting” (HLM) untuk mengantisipasi kenaikan harga selama perayaan hari besar keagamaan, yakni Hari Raya Galungan, Kuningan, puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

“TPID Badung harus dapat melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi peningkatan permintaan barang pada saat hari besar keagamaan,” kata Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa saat menghadiri kegiatan tersebut di Mangupura, Kamis.

Wabup Suiasa mengatakan, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menjaga ketersediaan dan kestabilan harga. Seperti untuk persediaan pasokan beras dan bahan pangan lainnya bekerja sama

dengan Bulog.

“Selain itu juga diperlukan keikutsertaan para pelaku usaha dalam menjaga harga agar tetap stabil,” kata Wabup Suiasa.

Wabup Suiasa menjelaskan, pengendalian inflasi tahun 2018 dihadapkan pada tantangan inflasi yang semakin berat, mengingat adanya sejumlah resiko pengendalian inflasi seperti, tingginya ketergantungan bahan pangan dari luar Badung untuk memenuhi kebutuhan di daerah itu.

“Peningkatan permintaan seiring adanya perayaan hari besar keagamaan, `peak season` kunjungan wisatawan, akan digelarnya IMF Annual Meeting dan aksi teror di beberapa daerah yang berdampak terhadap situasi keamanan Bali juga dapat mengakibatkan terganggunya distribusi barang,” ujarnya.

Lebih lanjut Suiasa men-



Wabup Suiasa disaat menghadiri high level meeting di ruang Nayaka Gosana Puspem Badung, Kamis. Foto Humas Pemkab Badung

gatakan, “action plan” dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang hari Raya keagamaan adalah dengan mengadakan pemantauan ke gudang penyimpanan dan sidak pasar untuk memastikan kelancaran suplai dan adanya kesediaan barang.

“Selain itu, pelaksanaan pasar murah pada tempat-tempat strategis dan penjualan barang yang sesuai

kebutuhan masyarakat untuk keperluan hari raya juga dapat membantu menjaga stabilitas harga,” katanya.

Selain itu, Wabup Suiasa meminta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melakukan koordinasi dan mengimbau para distributor dan pedagang besar untuk menyediakan program diskon dan tidak menaikkan harga yang tidak wajar. (Adv)

Wabup Badung Minta Desa Bentuk Tim Terpadu



Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. (Humas Pemkab Badung)

Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa meminta pemerintahan desa dan kelurahan membentuk tim terpadu untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Badung.

"Kami minta desa dan kelurahan membentuk tim ter-

padu di wilayahnya masing-masing untuk meningkatkan pengamanan wilayah, seiring terjadinya ancaman terorisme di Indonesia" ujar Wabup Suiasa saat menghadiri Rapat Koordinasi Keamanan Wilayah Kabupaten Badung di Mangupura, Kamis.

Wabup Suiasa mengharapkan, tim terpadu di desa kelurahan nantinya juga dapat meningkatkan kegiatan patroli serta rutin melakukan penertiban penduduk tidak permanen.

"Kalau menemui penduduk yang tidak jelas identitasnya, jangan segan-segan menindak dan meminta segera kembali ke asalnya," ujar Suiasa.

Wabup Suiasa men-

gatakan, pelaksanaan Rakor yang melibatkan berbagai unsur, seperti TNI, Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Satgas Linmas dan Pecalang tersebut sangat positif dalam meningkatkan kewaspadaan dan keamanan wilayah Badung agar tidak terjadi aksi terorisme.

"Kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut menjaga keamanan wilayah. Kami bersama Forkompinda juga telah rutin setiap bulan melaksanakan koordinasi dan sepakat membentuk Forum Antisipasi dan Pencegahan Terorisme di Badung," katanya.

Untuk mengantisipasi aksi terorisme, Wabup Suiasa menjelaskan, Pemkab Ba-

badung telah melakukan upaya antisipasi melalui kegiatan sesuai konsep ajaran agama Hindu yakni "Tri Hita Karana".

"Pemkab Badung bersama FKUB dan seluruh komponen telah melaksanakan kegiatan doa bersama di Pusat Peribadatan Puja Mandala Nusa Dua, Rabu (16/5) kemarin," katanya.

Dari kegiatan Rakor tersebut, Wabup Suiasa juga mengimbau masing-masing desa dan kelurahan untuk kembali melakukan rapat terkait Kantibmas dengan melibatkan tokoh agama, tokoh politik, tokoh lintas profesi termasuk pensiunan purnawirawan TNI maupun Polri. (Adv)

Pemkab Badung Raih "JKN-KIS Award 2018"

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih penghargaan bidang kesehatan yakni, Universal Health Coverage (UHC) JKN-KIS Award 2018 dari BPJS Pusat yang diserahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

"Penghargaan ini merupakan keberhasilan program Badung sehat dengan Kartu Badung Sehat (KBS) yang telah memberikan dampak positif untuk masyarakat," ujar Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta melalui keterangan pers yang diterima Antara di Mangupura.

Bupati Giri Prasta mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung tidak hanya membangun Badung dari segi infrastruktur fisik dalam upaya meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakatnya.

"Selain infrastruktur, kami juga menaruh perhatian terhadap pelayanan kesehatan yang maksimal bagi seluruh masyarakat Badung," katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, terjaminnya kesehatan seluruh masyarakat secara lahir dan batin merupakan salah satu upaya menjadikan Badung yang kuat.

"Dengan terintegrasinya BPJS Kesehatan dengan jaminan pelayanan kes-



Persiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyerahkan penghargaan UHC kepada Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/5) (Foto Humas Pemkab. Badung)

ehatan dari Pemkab Badung yang merata dan berkualitas, telah memberikan dampak yang positif kepada pembangunan manusia di Badung," ujarnya.

"Mari kita bangun Badung dengan tetap menjaga kesehatan untuk mewujudkan Badung yang kuat," ujar Bupati Giri Prasta.

Penghargaan yang diterima Pemkab Badung tersebut, merupakan penghar-

gaan tertinggi yang dicapai Pemkab Badung di bidang kesehatan berkat pencapaian program kartu Indonesia Sehat yang disnergikan dengan Kartu Badung sehat (KBS).

"Kami berharap seluruh masyarakat Kabupaten Badung akan tumbuh menjadi insan yang sehat dan kuat untuk membangun Badung di masa depan," ujar Bupati Giri Prasta. (Adv)

Wabup Badung Imbau Masyarakat Bersatu Tingkatkan Toleransi



Wabup Ketut Suiasa bersama pimpinan FKUB, Polri dan TNI menggelar doa bersama di kompleks peribadatan Puja Mandala Nusa Dua. (Humas Pemkab Badung)

Wakil Bupati Badung, Bali, Ketut Suiasa, mengimbau seluruh elemen dan komponen masyarakat khususnya di wilayah Badung untuk terus menjaga persatuan dan meningkatkan toleransi.

“Kami juga mengharapkan masyarakat dapat memperkuat

diri dalam jalinan tali silaturahmi, toleransi, persaudaraan serta kekeluargaan,” ujar Wabup Suiasa saat menghadiri kegiatan aksi doa bersama menolak aksi terorisme di kompleks peribadatan Puja Mandala Nusa Dua, Badung, Rabu.

Wabup Suiasa mengatakan,

pihaknya juga mengimbau agar seluruh komponen masyarakat senantiasa terus mengawal kedamaian dan kenyamanan dimanapun berada. “Melalui kesempatan doa bersama ini, kami juga memohon tuntunan dan bimbingan agar senantiasa diberikan jalan yang terbaik sehingga bisa menjaga kerukunan dalam berkehidupan, saling menjaga cinta kasih sekaligus mendoakan untuk diberikan keselamatan lahir dan batin,” ujarnya.

Wabup Suiasa juga meminta warga masyarakat untuk tidak terlena dan selalu waspada terhadap segala potensi ulah oknum yang ingin memecah belah, merusak kedamaian dan ketentraman wilayah.

“Kami juga sudah menginstruksikan kepada jajaran di tingkat terbawah untuk

melakukan pengawasan dan peningkatan kewaspadaan, terhadap dinamika di wilayahnya masing-masing,” kata Wabup Suiasa.

Wabup Suiasa menambahkan, pihaknya juga akan melaksanakan koordinasi dan konsolidasi bersama seluruh jajaran dan aparat, mulai dari Bendesa Adat, Linmas, Pecalang, tokoh adat serta tokoh masyarakat untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam mengantisipasi dan menjaga keamanan Badung.

Terkait dengan kegiatan doa bersama tersebut, Wabup Suiasa berharap seluruh umat beragama di kabupaten Badung dapat diberikan kekuatan lahir dan batin. Sehingga dapat semakin teguh dan bersatu, dalam menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. (Adv)

Badung-Denpasar Tandatangani Kesepakatan Zona Integritas

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali dan Pemerintah Kota Denpasar beserta jajaran Muspida menandatangani Kesepakatan Zona Integritas guna mewujudkan pemerintahan yang baik serta bebas dari KKN di Ruang Sidang Utama Cakra, Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Denpasar.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kepala Pengadilan Negeri Denpasar yang telah menginisiasi nota kesepahaman terkait zona berintegritas dan bebas KKN ini,” ujar Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, Rabu.

Bupati Giri Prasta mengatakan, pihaknya akan tetap berkomunikasi dan memohon arahan serta petunjuk di dalam tatanan untuk membangun wilayah Kabupaten Badung sebagai antisipasi agar tidak terjadi persoalan hukum.

“Tidak hanya dengan Pengadilan Negeri, kami bersama

TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) juga selalu berkomunikasi dan bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Denpasar terkait permohonan ‘Legal Opinion’,” katanya.

Bupati Giri Prasta menjelaskan, Pemkab Badung akan selalu mendukung pihak Pengadilan Negeri Denpasar berkaitan dengan pelaksanaan penanganan kasus yang ada di wilayah Provinsi Bali khususnya yang ada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

“Selama ini sinergitas kami sudah berjalan cukup baik dan kami selaku Pemerintah Kabupaten Badung siap apabila nanti dibutuhkan untuk membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan Pengadilan Negeri Denpasar,” ujarnya.

Bupati Giri Prasta menambahkan, Pemkab Badung tidak ingin “Naik Kelas” terkait dengan permasalahan hukum di pemerintahan. “Mulai men-



Bupati Giri Prasta selesai menandatangani Kesepakatan Zona Integritas di Ruang Sidang Utama Cakra di Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar. (Foto Humas Pemkab. Badung)

jadi saksi, naik kelas menjadi tersangka, naik kelas lagi menjadi terdakwa, naik kelas lagi menjadi terpidana. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu kami tetap mohon arahan dan petunjuk untuk mampu melaksanakan tugas dengan baik dan benar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Amin Ismanto mengatakan, maksud dari pencaanangan

pembangunan zona integritas tersebut adalah untuk memproklamasikan bahwa pihak-pihak terkait sudah terintegrasi.

“Selain itu pencaanangan pembangunan zona integritas ini untuk menunjukkan bahwa keinginan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan Zona Integritas yang Bebas dari Korupsi, Koneksi dan Nepotisme (KKN) sudah dilaksanakan,” ujarnya. (Adv)

Bupati Badung Ajak Lembaga Adat dan Dinas Kuta Bersatu Membangun Badung

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengajak seluruh tokoh masyarakat, terutama Forum Lembaga Adat dan Lembaga Dinas se-Kecamatan Kuta Utara untuk bersatu dan bersama-sama membangun wilayah Kuta Utara dan Kabupaten Badung pada umumnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Giri Prasta bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa dan Ketua Komisi IV DPRD Badung A.A N Ketut Agus Nadi Putra saat mengukuhkan Forum Lembaga Adat dan Dinas se-Kecamatan Kuta Utara di ruang pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Jumat (18/5).

Menurut Bupati, forum lembaga adat dan dinas memiliki peran yang amat sangat penting selaku garda terdepan terhadap penanganan masalah-masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungannya masing-masing. "Untuk itu kami harapkan terus tingkatkan sinergitas, komunikasi dan koordinasi sehingga

apa yang menjadi tujuan dari terbentuknya forum ini untuk mewujudkan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat berjalan baik yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat," kata Bupati.

Dijelaskan, bahwa Pemkab Badung mempunyai komitmen kuat untuk membangun wilayah Kuta Utara sebagai kawasan pariwisata termasuk mendukung kelompok masyarakat dalam menggali potensi kearifan lokal wilayahnya. Dalam hal ini, Pemkab Badung akan melakukan penataan disepanjang pantai Kuta Utara seperti pantai Brawa, Canggung maupun Petitenget.

Bupati juga berupaya membangun kekuatan purusa/perbekel dan predana/desa adat. Dimana sebagai wadah ekonomi desa dengan adanya BUMDes dan generasi millennialnya Karang Taruna. Sementara Desa Adat, wadah ekonominya BUMDa, generasi millennialnya Sabha Yowana. "Kami ingin



Bupati Giri Prasta bersama Wabup. I Ketut Suiasa dan Ketua Komisi IV DPRD Badung A.A N Ketut Agus Nadi Putra saat mengukuhkan Forum Lembaga Adat dan Dinas se-Kecamatan Kuta Utara di ruang pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung. (Foto Humas Pemkab. Badung)

mengajak bersama-sama untuk berbuat yang bagus, sehingga dapat diwarisi ke anak cucu kita nanti," tambahnya.

Disisi lain, disampaikan bahwa, ketika Bapak Presiden RI Joko Widodo mengatakan Revolusi Mental, Indonesia Hebat, Bupati Giri Prasta berpikir sederhana dengan mengambil kebijakan melalui 5 (lima) skala prioritas program pembangunan meliputi; pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jami-

nan sosial dan tenaga kerja, seni, adat, agama, tradisi dan budaya serta pariwisata termasuk infrastruktur.

"Kelima program prioritas ini dituangkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Semesta menyeluruh, berencana terpola," terangnya. Program ini telah diimplementasikan melalui program bedah rumah, kesehatan dan pendidikan gratis, PBB gratis, termasuk wifi gratis. (Adv)

Bupati Badung Serahkan SK 20 Kepala Sekolah



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga I Ketut Widia Astika menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Badung kepada 20 fungsional guru, Jumat(18/5) lalu di Rumah Jabatan Bupati Badung (Foto Humas Pemkab. Badung)

Guna mengisi kekosongan Guru Kepala Seko-

lah disetiap Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menen-

gah Pertama (SMP) sebagai bentuk komitmen Pemkab Badung dalam menjalankan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), utamanya dalam bidang pendidikan.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga I Ketut Widia Astika menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Badung kepada 20 fungsional guru, Jumat(18/5) lalu di Rumah Jabatan Bupati Badung, Jumat (18/5)

Bupati Badung Giri Prasta menyampaikan bahwa di Kabupaten Badung ke depan

ini harus menjadi center of excellence, bagaimana adukasi, bagaimana human resources ini biasa dilakukan dengan baik. Hal ini menjadi tugas dari para kepala sekolah, karena kepala sekolah dan guru-guru yang akan menuntaskan menjadikan anak-anak didik sebagai generasi penerus bangsa yang bagus sehingga akan muncul pendidikan yang bermutu.

"Ada pepatah mengatakan orang hebat hanya mampu menghasilkan beberapa karya yang bermutu, akan tetapi guru yang bermutu akan menghasilkan ribuan orang-orang hebat," terangnya. (Adv)

Badung Gelar Bimtek Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN



Sekda Adi Arnawa disaat menerima Narasumber dari Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara Dr. Herman serangkaian Bimtek Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (23/5) di Puspem Badung (Foto Humas Pemkab. Badung)

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, Bali, menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat Pemerintahan

Badung, Mangupura.

“Bimtek ini bertujuan untuk tersedianya indikator kualitas ASN yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa,

Rabu.

Sekda Adi Arnawa mengatakan, pihaknya menyambut baik digelarnya kegiatan tersebut karena merupakan bagian dari persiapan Pemkab Badung dalam menerapkan e-kinerja secara penuh.

“Untuk itu kami dorong BKPSDM secara rutin melaksanakan kegiatan bimtek ini guna mengukur indeks profesionalitas ASN. Selain itu juga perlu dilaksanakan kegiatan bersifat teknis, baik itu menyangkut auditor, masalah IT, untuk mendukung pembangunan di Badung,” ujarnya.

Sekda Adi Arnawa menambahkan, sistem e-kinerja di Pemkab Badung telah mulai diterapkan pada awal tahun 2018, namun dalam perjalanan masih perlu evaluasi.

“Sistem ini cukup mengem-birakan karena kehadiran pegawai cukup bagus, disiplin sudah mulai meningkat. Kinerja juga sudah baik, terlihat dari kegiatan fisik dengan capaian realisasi keuangan sudah mulai mendekati,” katanya.

Ketua Panitia Ngurah Bagus Wirayasa mengatakan, maksud diadakan bimtek tersebut untuk membimbing pengelola kepegawaian unit kerja sehingga dapat melaksanakan proses penghitungan Indeks Profesional Pegawai ASN di intansinya masing-masing.

“Selain itu, ini bertujuan mewujudkan tersedianya indikator kualitas ASN yang lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas ketersediaan data,” katanya. (Adv)

Mendag dan Wabup Badung Pantau Pasar Desa Adat Pecatu Pastikan Ketersediaan Pangan Stabil

Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita bersama Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok di Pasar Desa Adat Pecatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Jumat (25/5).

Mendag Lukita tiba di Pasar Desa Adat Pecatu bersama Wakil Bupati Badung didampingi oleh staf kemendag, Camat Kuta Selatan, Bendesa Adat Pecatu, dan perangkat lainnya.

Kedatangan Mendag, Lukita kedua kalinya di Bali untuk memantau pasar ini untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harganya di pasar stabil.

Sementara itu Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa sesuai mendampingi rombongan kementerian, mengatakan kehadiran Mendag ini tujuan utamanya adalah melakukan monitoring ketersediaan bahan baku di pasar. Utamanya

bahan pokok.

Menurut Suiasa sampai saat ini harga komoditas di pasar - pasar di Badung masih dalam taraf kewajaran. Selain itu ketersediaan komoditas masih terkendali. Dia juga mengatakan kalau Pemkab Badung terus melakukan pemantauan bahan pokok pada bulan Ramadhan.

Menurut pejabat asal desa Pecatu, Kuta selatan ini, seperti biasanya dalam menyambut hari raya besar seperti Ramadhan dan Galungan kerap terjadi resistensi harga. Karenanya Tim penilaian inflasi daerah juga sudah mengkoordinasikan bagaimana soal ketersediaannya, distribusinya, dan pengendalian harganya.

“Ini sudah kami bahas, sampai saat ini dari sisi ketersediaan cukup, distribusi tak mengalami hambatan, harga stabil. Kami bersama TPID Badung setiap minggu turun ke lapangan sampai hari raya



Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita bersama Wabup Badung I Ketut Suiasa melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok di Pasar Desa Adat Pecatu, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Humas Pemkab Badung. (Foto Humas Pemkab. Badung)

berakhir, juga monitoring dan evaluasi-evaluasi menyangkut ketersediaan, distribusi, dan penilaian pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Mendag Enggartiasto Lukita, mengungkapkan secara keseluruhan pada daerah yang dikunjunginya semuanya aman. “Pasar yang relatif ukurannya kecil saja harga bahan pokok terkendali,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menegaskan stok beras selama bulan

puasa ini cukup. Dimana stok beras saat ini 1,2 juta ton beras impor di bulog, itupun baru sekitar 600.000 ton import yang masuk. “Kami akan impor lagi sekitar 400.000 ton lagi. Keputusan ini adalah keputusan Rakor Menko Per-ekonomian. Rakor itu dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog. Beras ini diimpor dari Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan,” katanya. (adv)



PEMERINTAH PROVINSI BALI

Selamat Hari Raya Galungan & Kuningan

(30 Mei 2018)

(9 Juni 2018)

Kepada Seluruh Umat Hindu Dimanapun Berada

"Melalui Kemenangan Dharma Atas Adharma, Kita Mantapkan Pelaksanaan Swadharma, Dalam Rangka Mewujudkan Kehidupan yang Lebih Baik, Menuju Masyarakat Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)"



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA GALUNGAN & KUNINGAN

(30 MEI 2018)

(9 JUNI 2018)

"DUMOGI JAGAT BADUNG SHANTI LAN JAGADHITA"

Bupati Badung

Wakil Bupati Badung



I Nyoman Giri Prasta, S.Sos



Drs. I Ketut Suiasa, SH